IDEOLOGI DAN WAWASAN - PANCASILA

2025

PERDA SUMUT NO 2, LD 2025/ NO 2 ,TLD No. 78, 14 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila perlu pedoman dalam pelaksanaannya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.8 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Pepres No. 87 Tahun 2017; Pepres No. 51 Tahun 2022; Permendagri No. 29 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2011; Permendagri No. 71 Tahun 2012; Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2022; Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2017; Perda Sumut No. 9 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah, meliputi Pengamalan Pancasila, Membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal, Partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan penyebarluasan, mendorong mendukung pelaksanaan, meningkatkan kemampuan dan pembinaan, meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 19 Maret 2025;
 - Lampiran : 4 hlm